

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KREDIT BERMASALAH
(Studi Pada Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan oleh:

Dhia Eka Saputra

NIM 122200027

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Dhia Eka Saputra: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah (Studi Pada Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Character* (X1), *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4) dan *Condition* (X5) terhadap tingkat kredit bermasalah (Y). Populasi dari penelitian ini adalah 165 nasabah Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah sedangkan sampel terdiri dari 50 nasabah yang ditentukan dengan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan *cross-sectional*, penelitian dilakukan dengan cara *survey* dan informasi dikumpulkan menggunakan kuesioner.

Hasil Uji-f untuk kredit bermasalah sebesar 0,012 yang berada dibawah nilai alpha 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} lebih besar dari pada nilai f_{tabel} ($f_{hitung} = 3,366 > f_{tabel} = 2,430$) yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji determinan R^2 menunjukkan persentase sumbangan dari variasi variabel *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* terhadap Kredit Bermasalah sebesar 27,7% dan sisanya sebesar 72,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Kredit Bermasalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.¹

Salah satu tujuan penting dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh rakyat. Dalam konteks kesejahteraan rakyat inilah Negara berkewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian rakyat. Penanggulangan kemiskinan adalah masalah utama pembangunan dan karenanya harus menjadi tujuan utama pembangunan.

Sebagaimana umumnya Negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas Bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi resiko terbesar dalam bank juga

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. ke-5. (Jakarta, Kencana:2008) hlm, 40

bersumber dalam pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus diawasi dengan manajemen resiko yang ketat.²

Semakin susahnya masyarakat mencari pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada, menuntut masyarakat untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan seluruh potensi baik dari kemampuan diri maupun pengelolaan sumberdaya alam yang ada untuk menghasilkan sebuah kegiatan yang menghasilkan keuntungan berupa materi. Hal ini menimbulkan sebuah masalah baru di lingkungan masyarakat, karena untuk melakukan kegiatan tersebut diperlukan sebuah modal usaha yang pada lapisan masyarakat menengah kebawah merupakan kendala terbesar yang harus mereka hadapi. Pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam aktivitas sektor-sektor usaha terus melakukan upaya untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha kecil menengah agar menjadi alat penggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah yaitu melalui sektor perbankan dengan pemberian pembiayaan dengan bunga rendah kepada usaha-usaha kecil menengah. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal usaha yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Lembaga-lembaga keuangan yang ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut ikut berlomba-lomba dalam memberikan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha. Produk-produk yang diberikan dengan berbagai keunggulan seperti suku bunga yang

² InfoBankNews.com

bersaing, mudahnya syarat-syarat pembiayaan dan kemudahan dalam proses transaksi maupun administrasi. Walaupun demikian, dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada para pelaku usaha menimbulkan sebuah masalah baru, yaitu munculnya resiko pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan yang mempengaruhi kelangsungan tumbuh kembangnya lembaga keuangan. Resiko tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lembaga keuangan yang dirugikan.

Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha dan perbankan sebagai penggerak sektor riil. Setelah krisis moneter tahun 1997 sampai saat ini perkembangan dunia usaha / sektor riil belum berjalan normal. Hal ini karena perbankan belum memberikan layanan yang optimal dalam meningkatkan sektor usaha seperti dalam hal pengucuran kredit. Salah satu penyebab perbankan masih ragu dalam mengucurkan dana kredit adalah karena jumlah kredit bermasalah (NPL) masih cukup besar. Dalam mendukung kegiatan sektor riil, perbankan saat ini melakukan perubahan kebijakan. Khusus di dalam penyaluran kredit, selain berprinsip kehati-hatian, saat ini perbankan juga memulai memberikan porsi yang lebih banyak pada kredit kecil dan menengah.³

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha

³ Sjafitri Henny, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit Dalam Dunia Perbankan*" Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, volume 2, nomor 2, 2011.

yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”.

Badan usaha ini dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik Desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, Desa merupakan basis dari sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga Desa merupakan *miniature* dan *sample* yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Melalui Desa inilah Badan Usaha Milik Desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan Desa yang didasarkan pada peraturan daerah.⁴

Disyaratkan dalam pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes salah satunya dengan Perusahaan Umum Desa (PERUMDES).⁵

⁴Coristya Berlian Ramadana, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm. 1068-1069.

⁵Amelia Sri Kusuma Dewi. “Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepak” Jurnal Pamator Volume 3 Nomor 2 2010, hlm. 118.

PERUMDES diharapkan juga mampu untuk menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Substansi dan filosofi PERUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *Self Help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli Desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran PERUMDES dalam BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *Free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *Rente*.⁶

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menilai kredit macet atau bermasalah adalah sebuah masalah yang sangat penting, karena sangat menghambat tumbuhnya laju perekonomian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah (Studi Pada Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari)**.

B. Identifikasi Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan terus meningkat dan dihadapkan pada sumber pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga kredit menjadi salah satu alternatif yang paling

⁶Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta, Erlangga: 2011) hlm.88

diminati masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. Dalam melakukan pemberian kredit, suatu lembaga keuangan seperti PERUMDES haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar seperti terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Apabila kredit macetnya meningkat, maka pihak PERUMDES akan mengalami kesulitan dalam likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Kredit macet dapat terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur yang tidak bisa menjalankan kewajibannya. Agar nantinya tidak terjadi masalah seperti kredit macet maka sebelum melakukan pemberian kredit PERUMDES harus memperhatikan unsur 5 C (*The Five of Credit*), yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* sebagai prinsip penilaian kredit.

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui apakah faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* debitur berpengaruh terhadap tingkat Kredit Bermasalah pada Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral*

dan *Condition* debitur terhadap tingkat kredit macet di Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan dan dipergunakan secara langsung oleh pihak-pihak yang membutuhkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan mengenai sebuah permasalahan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah kontribusi secara langsung dari peneliti untuk pembangunan Desa melalui pemecahan masalah yang menjadi salah satu kendala perkembangan roda perekonomian masyarakat Desa.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya perbaikan setelah mengetahui apa yang menyebabkan kredit macet terjadi, sehingga kedepannya penyaluran kredit dapat lebih baik dan bermanfaat, hal ini akan menjadikan kredit benar-benar dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan Desa. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Daerah.

3. Bagi Insitusi terkait

Bagi lembaga Jasa Keuangan PERUMDES Binangun Sejahtera Ngargosari, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa data yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perkembangan perusahaan. Dari data penelitian yang dilakukan, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Untuk lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa, dosen dan aktivis akademik lainnya dalam bidang keuangan khususnya perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswar, Syarifudin. 2008. *Realibilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelejar
- Budisantoso, Totok & Triandru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 2. Jakarta: Salemba.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. ke-5. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Riva'i, Veithzal, dkk. 2008. *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, edisi I cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi Dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Untung, Budi. 2011. *Kredit Perbankan di Indonesia* edisi II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiratna Sujarweni, Poly Endrayanto. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agnes Wahyu Anggraini. 2009. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang Tahun 2006"*. Semarang: Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hermanto. 2006. *Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang*. Semarang: Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

- Indra Marsen Sibarani. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumiasih NBP 34*. Medan: Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Kurnia Dwi Jayanti. 2013. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Loan (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Indonesia Periode 2008-2012)*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari Mukhsinaati. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Bank "X" di Kabupaten Jember*. Jember: Skripsi Universitas Jember.
- Vera Yohana BR Sitorus. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*. Medan: Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Widya Astutik. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta Tahun 2013)*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Malang: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang (JAP), Vol.1, No.6 Diunduh pada 30 Oktober 2015 Pukul 19.08 WIB.
- Gunarto Suhardi. 2006. *Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jurnal Projustitia Vol.24 No.1 Diunduh pada 3 November 2015 Pukul 22.48 WIB.
- Nurul Fitria, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan terhadap Loan To Deposit Ratio pada PT. Bank Rakyat Indonesia(persero),Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang Periode 2007-2011*.Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1 Diunduh pada 26 Agustus 2015 Pukul 17.06.
- Oktavia Anggra Dewi, Darminto, Maria Goretti Wi Endang NP. (2014) *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang (JAB) Vol.9 No.2 Diunduh pada 3 November 2015 Pukul 22.47 WIB.
- Sjafitri Henny. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit Dalam Dunia Perbankan*. Padang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, volume 2, nomor 2, ISSN:2086-503 Diunduh pada 28 Oktober 2015 Pukul 22.56 WIB.
- administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id Diakses pada 3 November 2015 Pukul 22.10 WIB.
- www.InfoBankNews.com Diakses pada 22 Oktober 2015 Pukul 22.26 WIB.